
**PERANAN KSPPS MUI MITRA USAHA IDEAL JATIM TERHADAP
PEREKONOMIAN MASYARAKAT PASCA PENUTUPAN LOKALISASI
BANGUNSARI**

Oleh

Mir'atul Hasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya

Email: tulhasanahmira@gmail.com

Abstract

The Surabaya City Government has closed several localization sites which have become places for prostitutes (commercial sex workers) to fulfill their daily lives. This is done as an effort to solve social problems. The Surabaya City Government through the KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim institution in the Bangunsari area is felt to have a role in restoring the economic condition of the affected community after the closure of the localization. Therefore, we examined the Role of KSPPS Ideal Business Partners on the Community Economy after the Closing of Bangunsari Localization using qualitative research methods through secondary data sources. The results of our financial research show that there are 2 KSPPS products of MUI Ideal Business Partners in East Java which are for profit which can support the recovery of the Bangunsari economy, especially in terms of products with profit sharing patterns and buying and selling patterns with mark ups. In general, the KSPPS MUI Mitra Usaha Jatim also has 3 roles in the financial sector, the real sector and the religious sector.

Keywords: Cooperative, Localization & Community Economy

PENDAHULUAN

Di Provinsi Jawa Timur terdapat 47 lokalisasi PSK dengan rincian 1.031 mucikari dan 7.127 PSK yang tersebar di 33 kabupaten dan kota. Dari jumlah itu, sebanyak 6 lokalisasi dengan 534 mucikari dan 2.231 PSK berada di Surabaya (Pandia, 2011). Sehingga terbitlah surat Gubernur Jatim tertanggal 30 November 2010 Nomor 460/16474/031/2010 perihal Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, serta Perdagangan Perempuan. Isi surat tersebut adalah menutup tanpa merelokasi lokalisasi di Jatim dan mengembangkan aktivitas perekonomian baru dengan menangani kasus *human trafficking* secara sungguh-sungguh (Gubernur Jatim, 2010).

Sejak tahun 2010, satu per satu lokalisasi ditutup. Selain Dolly dan Jarak, lokalisasi lain yang juga ditutup adalah di kawasan Tambak Asri, Klakah Rejo, Moro Seneng, dan Dupak Bangunsari. Rencana penutupan lokalisasi bermula ketika Tri Risma Harini selaku Walikota Surabaya mengetahui

masih banyak kasus perdagangan manusia di Surabaya dan lokalisasi menjadi pasarnya. Beliau pun mulai bersosialisasi didampingi oleh tokoh agama sekitar dengan mengunjungi setiap sekolah yang terdampak lokalisasi juga menemui PSK dan warga terdampak dengan memberi tahu ada usaha lain yang lebih baik dan menguntungkan. Walikota mengingatkan pula, lokalisasi menciptakan lingkungan buruk sehingga berpengaruh dengan kondisi perkembangan mental masyarakat terdampak.

Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang menutup beberapa daerah lokalisasi, salah satunya berada di Kecamatan Krembangan tepatnya di kelurahan Dupak Bangunsari, kecamatan Krembangan. Pemerintah kota Surabaya secara resmi menutup tempat izin lokalisasi tersebut pada tanggal 21 Desember 2012. Walaupun resmi ditutup, namun proses rehabilitasi kawasan eks-lokalisasi memerlukan waktu (Nikmah, 2015:22). Hal ini tentu berdampak terhadap pendapatan dan penghasilan untuk mencukupi

kehidupan sehari-hari dari masyarakat di daerah lokalisasi tersebut, salah satunya masyarakat yang menjadi PSK (Pekerja Seks Komersial).

Kemunculan Pekerja Seks Komersial (PSK) tentunya tidak langsung ada begitu saja ditengah masyarakat namun dipicu oleh beberapa faktor, yakni *pertama* faktor kemiskinan, *kedua* faktor kebodohan (pendidikan), *ketiga* faktor moralitas atau keimanan dan, *keempat* faktor lingkungan (Rismala, 2016:3). Tidak dapat dipungkiri bahwa para pekerja seks komersial ataupun bisnis prostitusi memang salah satu profesi yang sedang marak terjadi, tumbuh dan berkembang yang bahkan menjadi *trend* di masyarakat disebabkan oleh peminat yang banyak dan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan dimana tidak butuh waktu yang lama untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah ratusan bahkan jutaan yang bisa diraih dalam waktu sehari bekerja atau bahkan hanya dalam beberapa jam bekerja.

Disisi lain dari penghasilan yang menggiurkan, tentu terdapat dampak dari adanya prostitusi ataupun lokalisasi, salah satunya adalah dengan timbulnya masalah sosial. Pekerja seks komersial (PSK) dianggap sebagai salah satu masalah sosial, karena pekerjaan ini bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya (Ambarawati, 2020:162). Masalah sosial merupakan ketidaksesuaian unsur nilai dan norma sosial yang ada dalam masyarakat sehingga menghambat anggota masyarakat dalam usahanya mencapai tujuan.

Dampak penutupan lokalisasi secara umum adalah hilangnya pekerjaan dari para pekerja seks. Dengan seseorang atau masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan secara tetap atau tidak memiliki penghasilan maka hal tersebut juga berdampak pada perekonomian suatu daerah itu sendiri. Maka, masyarakat memerlukan jasa atau layanan yang dapat

menjadi pendorong atau usaha untuk meningkatkan suatu perekonomian rakyat atau masyarakat tersebut. Kesadaran masyarakat akan kesejahteraan ekonomi menjadi dasar untuk membangun sebuah perekonomian yang kreatif dan bersaing. Akan tetapi, hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini setelah adanya lokalisasi dan bahkan setelah penutupan lokalisasi. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Bangunsari, maka terdapat suatu jasa keuangan yang dibutuhkan yaitu koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah atau dikenal dengan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jawa Timur.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infaq sedekah dan wakaf. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) juga termasuk pada lembaga keuangan Non-Bank yang beroperasi dengan sistem syariah yang secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian pasal 44, 1992). Koperasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah. Koperasi juga merupakan wadah perekonomian yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umunya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim di Bangunsari tentu diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan khususnya tentu diharapkan mampu menjadi penolong bagi perekonomian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Sebagaimana kita tahu bahwa penutupan lokalisasi telah merenggut beberapa mata pencaharian di daerah Bangunsari, maka hal ini menarik dibahasnya tentang peranan KSPPI MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pasca penutupan lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya.

Rumusan Masalah

1. Apa saja potensi masyarakat di daerah eks-lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya?
2. Bagaimana strategi KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim terhadap perekonomian masyarakat terdampak?
3. Bagaimana peranan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim terhadap perekonomian masyarakat yang terdampak pasca penutupan lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya?

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Cara memperoleh data menjadi penting karena dapat mempengaruhi valid tidaknya hasil analisis dalam sebuah penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, dimana peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian tentang fenomena lokalisasi yang terjadi dengan rinci dan menggambarkan hal apa yang dapat dilakukan oleh KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah lokalisasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berisi “kata-kata” dan “tindakan”, selebihnya berisi tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2002).

Hasil tersebut akan disimpulkan melalui data yang akan terlampir. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data

sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapat oleh seorang peneliti secara tidak langsung, dimana peneliti memperoleh data sekunder dari pihak lain yang telah melakukan observasi. Data sekunder bisa diperoleh melalui media dan lembaga penelitian yang terpercaya (Situmorang, 2011:42). Teknik pengumpulan data sekunder adalah melalui studi pustaka dengan mengumpulkan informasi melalui pendalaman literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek studi.

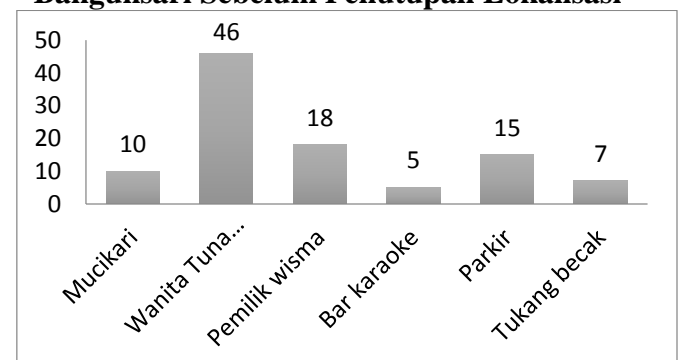
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Masyarakat di daerah eks-lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya

Upaya pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan penutupan lokalisasi Bangunsari pada 21 Desember 2012 dengan harapan daerah tersebut bebas dari kegiatan prostitusi dan membuat masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi dan mempunyai nilai norma-norma keasusilaan. Akan tetapi penutupan lokalisasi ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat di daerah lokalisasi tersebut karena mereka akan kehilangan pekerjaan. Jika akibat ini tidak mampu diatasi oleh pemerintah kota surabaya maka akan menimbulkan masalah sosial ekonomi masyarakat di daerah tersebut.

Pola hidup masyarakat Bangunsari mengalami perubahan setelah penutupan lokalisasi dari segi pekerjaan. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh Indra Pratama mengenai perubahan pekerjaan masyarakat Bangunsari sebelum dan sesudah penutupan lokalisasi (Pratama, 2014:2-3).

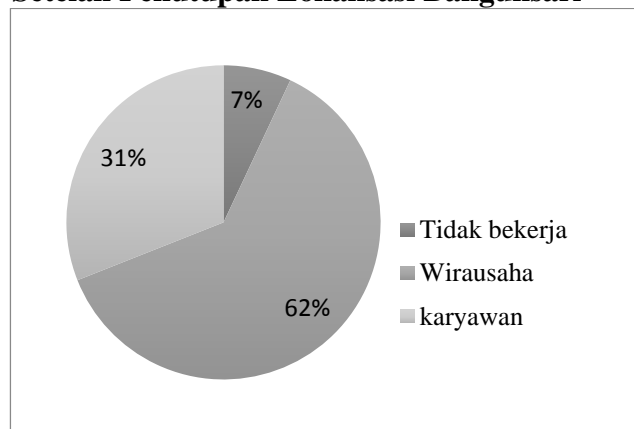
Gambar 1. Pekerjaan Masyarakat Bangunsari Sebelum Penutupan Lokalisasi



Sumber: Data Primer, Diolah Penulis, 2020

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa pekerjaan saat sebelum penutupan lokalisasi yang paling banyak adalah Wanita Tuna Susila (WTS) dan pekerjaan yang paling sedikit adalah sebagai bar karaoke. Sedangkan, pekerjaan setelah ditutupnya lokalisasi dapat dilihat dalam grafik berikut.

Tabel 2. Pekerjaan Masyarakat Bangunsari Setelah Penutupan Lokalisasi Bangunsari



Sumber: Data Primer, Diolah Penulis, 2020

Dari Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa setelah adanya penutupan lokalisasi Bagunsari, penduduknya sebagian besar beralih profesi sebagai wirausaha yaitu 62%, menjadi karyawan sebesar 31% dan sangat sedikit yang tidak bekerja yaitu sebesar 7%.

Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya menyelesaikan masalah sosial dan norma kesusilaan yang terjadi di Bangunsari, tetapi juga memberi solusi agar masalah perekonomian masyarakat benar-benar teratasi. Pemerintah Kota Surabaya memberikan pilihan kepada PSK apakah akan mengikuti pembinaan dari LSM dan Dinas Sosial atau pulang ke kampung halaman.

Pemerintah Kota Surabaya yang meliputi Bapemas KB Kota Surabaya, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran untuk membangun roda perekonomian akibat penutupan lokalisasi Bangunsari dengan melakukan upaya pemberdayaan melalui pengembangan wirausaha di eks -Lokalisasi Bangunsari. Walaupun dari segi jumlah penghasilan akan mengalami penurunan.

Adapun data jumlah penghasilan sesudah dan sebelum penutupan lokalisasi Bangunsari adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Rata-Rata Masyarakat Bangunsari Sebelum dan Sesudah Penutupan Lokalisasi

No	Pendapatan Sebelum Penutupan Lokalisasi	Jumlah	Pendapatan Setelah Penutupan Lokalisasi	Jumlah
1	>Rp 37.152.500	19	>Rp 8.263.500	23
2	<Rp 37.152.500	81	<Rp 8.263.500	77
Jumlah		100		100

Sumber: Data Primer, Diolah Penulis, 2020

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa penurunan pendapatan masyarakat Bangunsari sangat signifikan yaitu sekitar 4-5 kali lipat. Akan tetapi hal tersebut lebih bernilai positif dari segi etika dan norma yang berlaku dan mampu mengatasi masalah sosial ekonomi.

Pemerintah Kota Surabaya membangun UMKM dengan harapan masyarakat di daerah tersebut mampu berinovasi membuat produk-produk yang baik. Hal ini tercermin dengan mayoritas penduduk Bangunsari yang mengalihkan profesinya sebagai wirausaha. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya berperan aktif dalam pemulihan ekonomi di daerah Bangunsari dengan cara menjadi fasilitator dalam pengembangan usaha agar usaha yang dibangun oleh masyarakat di daerah tersebut dapat terus berjalan. Sedangkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya menangani dan lebih terfokus memberi pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat. Bahkan sebelum penutupan resmi digelar secara perlahan, pemerintah melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para PSK dan mucikari.

Pemerintah bersinergi dengan masyarakat Bangunsari terus berusaha dan berinovasi mengembangkan produk-produk unggul dan unik melalui proses inovasi sehingga menciptakan ide-ide baru dalam pengembangan UMKM yang telah mengantongi surat izin perdagangan (SIUP) dan segera memiliki tanda daftar Rekanan (TDR). Salah satu upaya yang dilakukan

masyarakat bangunsari dengan mendirikan rumah kreatif “Kembang Melati”. Rumah kreatif “Kembang Melati” melakukan produksi di berbagai industri seperti *handycraft* seperti gantungan kunci, bando, bros, dan dompet untuk ponsel. Selain itu juga memproduksi makanan atau *catering* dan kerajinan-kerajinan lainnya. Kini rumah kreatif “Kembang Melati” juga memproduksi keset dari kain perca. Banyak yang belum tahu produk keset dengan model mozaik itu ternyata sudah merambah mancanegara hingga ke Australia dan Belanda. Biasanya keset tersebut dititipkan ke sejumlah supermarket. Ada juga yang dijual ke Malang dan Pasuruan serta dibawa ke pameran di sejumlah daerah di nusantara (Jawa Pos, 2015).

2. Strategi KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat

KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim termasuk dalam kategori koperasi syariah atau yang biasa disebut sebagai Baitul Mal wat-Tamwil (BMT). Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hendrojogi, 2007:2). KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim merupakan koperasi yang menjalankan prinsip syariah sehingga memiliki 2 fungsi yaitu sebagai lembaga yang berorientasi profit dan non profit. Kegiatan usaha KSPPS yang berorientasi profit dengan produknya berupa simpanan, pinjaman, dan pembiayaan. Sedangkan, kegiatan usaha KSPPS yang berorientasi non profit yaitu penyaluran zakat, infaq, shodaqoh dll. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat di daerah Bangunsari Kota Surabaya, KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dapat membantu perekonomian dengan produk yang berorientasi profit maupun non profit.

Berdasarkan pembahasan mengenai potensi masyarakat di daerah eks-lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya dengan pendekatan produktif. Oleh karena itu dalam penelitian ini

kami menekankan membahas strategi-strategi yang dapat dilakukan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim terhadap perekonomian masyarakat dengan produk-produknya yang berorientasi profit dengan pola pembiayaan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pola Bagi Hasil

Perbedaan pembiayaan di lembaga keuangan syariah bank maupun non bank terdapat pada akad yang digunakan. Akad yang digunakan pada pembiayaan lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim sebagai lembaga keuangan syariah non bank harus memuhi prinsip-prinsip syariah dalam penyaluran dana dan maupun pengumpulan dana.

Maka, strategi yang dilakukan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap perekonomian masyarakat dengan menggunakan produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil akan sangat membantu masyarakat Bangunsari yang terkendala dalam hal modal untuk ekspansi produk maupun pengembangan produk. Sistem bagi hasil dalam KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dapat memilih dua akad yang akan digunakan yaitu akad musyarakah atau mudharabah. Pemilihan akad ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari nasabah yang akan mengajukan pembiayaan ke KSPPS.

Akad musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan kesepakatan untuk memberikan kontribusi atas usaha yang akan dijalankan dengan keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi dan kesepakatan masing-masing pihak. Akad ini akan sangat membantu Kelompok Swadaya Masyarakat yaitu KUB Mampu Jaya dan UMKM binaan pemerintah Kota Surabaya khususnya di Bangunsari dalam hal permodalan.

KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dapat melakukan strategi kerjasama kepada Pemerintah Kota Surabaya dengan menawarkan akad pembiayaan musyarakah UMKM binaan pemerintah Kota Surabaya

hususnya di Bangunsari. Dengan akad ini, KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim tidak hanya sebagai pemberi kepada UMKM binaan pemerintah Kota Surabaya khususnya di Bangunsari, tetapi juga bertanggung jawab untuk kelangsungan usaha yang mereka jalankan sehingga akan melahirkan keuntungan dari masing-masing pihak. Pemerintah Kota Surabaya akan terbantu oleh KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dalam upaya menjamin keberlangsungan usaha yang dilakukan masyarakat Bangunsari, KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim akan diuntungkan dengan bagi hasil yang akan diperoleh dari kerjasama tersebut, sedangkan Rumah kreatif “*Kembang Melati*” dan UMKM lainnya akan terbantu dalam hal modal dan ekspansi usahanya yang selanjutnya akan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Bangunsari. Jika hal tersebut terwujud maka kepercayaan masyarakat Bangunsari kepada KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim akan meningkat dan selanjutnya akan mampu meningkatkan daya jualnya.

Sedangkan, pola bagi hasil dengan akad mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang memiliki keahlian satu pihak sebagai pemberi modal dan pihak lainnya sebagai yang melaksanakan usaha, keuntungan di berikan sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemberi modal (Maulana, 2018:24). Produk pembiayaan KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dengan akad ini akan berguna bagi masyarakat bangunsari yang memiliki keahlian tetapi kesulitan dengan modal.

b. Pola Jual Beli dengan *Mark up*

Pola jual beli dengan *mark up* berbeda dengan sistem leasing atau kredit di perbankan konvensional. Pola jual beli *mark up* di KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim menggunakan akad murabahah dimana KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim yang menyediakan barang sesuai keinginan nasabah dan menjualnya dengan menaikkan harga yang diketahui oleh masing-masing pihak, lalu nasabah membayar barang tersebut dengan sistem cicilan.

Produk KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dengan pola jual beli dengan *mark up* akan berguna bagi UMKM di Bangunsari ketika membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses produksi. Hal ini akan berdampak positif terhadap keberlangsungan usaha yang dilakukan oleh masyarakat bangunsari dalam meningkatkan ekonomi mereka setelah penutupan lokalisasi.

3. Peran KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim Terhadap Perekonomian Masyarakat yang Terdampak Pasca Penutupan Lokalisasi Bangunsari Kota Surabaya

KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim sebagai lembaga keuangan non bank yang memiliki *positioning* pada level paling bawah dalam tatanan masyarakat berperan aktif dalam menggerakkan pemberdayaan ekonomi rakyat. KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim memiliki peran yang sama dengan BMT. Menurut Wahyu Dwi Agung setidaknya ada 3 peran yaitu peran pada sektor finansial, sektor rill dan pada sektor religious (Agung:6). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Sektor Finansial

Peran ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah, KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim melaksanakan peran ini dengan cara memberikan pembiayaan UMKM yang dibangun oleh masyarakat Bangunsari khususnya rumah kreatif “*Kembang Melati*” dalam rangka membantu modal usaha mereka.

b. Sektor Rill

Peran ini dilakukan dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil dalam hal manajemen, teknik pemasaran dan lainnya. KSPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim dalam melaksanakan peran ini berhubungan dengan sistem pembiayaan musyarakah yang mengharuskannya ikut andil dalam operasi usaha yang diberikan.

c. Sektor Religius

Peran ini dilakukan dengan dengan cara ajakan dan himbauan untuk aktif membayar zakat, kemudian KSPPS MUI Mitra Usaha

Ideal Jatim akan menyalurkan kepada yang berhak menerima fasilitas tersebut dengan pembiayaan *qordul hasan* (pinjaman lunak tanpa biaya).

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim sebagai koperasi syariah memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam upaya pemberdayaan masyarakat di daerah Bangunsari melalui pengembangan potensi-potensi masyarakatnya. Hal ini dibuktikan dengan pengembangan UMKM yang telah mengantongi surat izin perdagangan (SIUP) dan segera memiliki tanda daftar Rekanan (TDR) yakni didirikannya rumah kreatif "*Kembang Melati*". Rumah kreatif "*Kembang Melati*" melakukan produksi di berbagai industri seperti *handycraft* seperti gantungan kunci, bando, bros, dan dompet untuk ponsel. Selain itu juga memproduksi makanan atau *catering*, keset mozaik dan kerajinan-kerajinan lainnya yang produknya telah merambah ke dunia mancanegara. Upaya dalam membantu pemberdayaan masyarakat Bangunsari juga terbukti berdampak positif pada likuiditas dan profitabilitas KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim. Adapun produk-produk KPPPS MUI yang cocok untuk pemberdayaan masyarakat Bangunsari adalah produk-produk yang sifatnya profit yaitu produk dengan pola bagi hasil dan pola jual beli dengan *mark up*. KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim juga memiliki 3 peran yaitu peran pada sektor finansial, sektor rill dan pada sektor religious.

Saran

Adapun saran kepada KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim adalah dengan segera melakukan sinergitas dengan pemerintah Kota Surabaya agar keberadaan KPPPS MUI Mitra Usaha Ideal Jatim semakin berperan aktif bagi masyarakat Bangunsari dari upaya pemberdayaan masyarakatnya. Selain itu, untuk organisasi kemasyarakatan yang berada dalam lingkup wilayah Bangunsari diharapkan

dapat ikut membantu bersinergi juga, terutama ditekankan pada lingkup perekonomian sehingga masyarakat Bangunsari mendapatkan kesejahteraan ekonomi agar wilayah eks-lokalisasi berkembang menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, W. D. (n.d.). BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. 6.
- [2] Ambarawati, D. A. (2020). Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Bagi Masyarakat Semampir Kota Kediri . Jurnal Ilmus Sosial Dan Humaniora Univ Negeri Malang Vol. 9, No. 2, Oktober 2020, 162.
- [3] Gubernur Jatim. (2010). Pemerintah Provinsi Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi, serta Perdagangan Perempuan. Jawa Timur: Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- [4] Hendrojogi. (2007). Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [5] Jawa Pos. (2015). Upaya Maju Pesat, Produk Rambah Mancanegara. <https://www.uc.ac.id/library/usaha-maju-pesat-produk-rambah-mancanegara/>.
- [6] Maulana, A. (2018). Perilaku Konsumen Dalam Memilih Pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'Ah (Kspps) Mitra Usaha Ideal (Mui) Jawa Timur Cabang Krembangan Surabaya(Studi Kasus Masyarakat Eks-Lokalisasi Bangunsari Surabaya). Thesis UIN Sunan Ampel Surabaya, 24.
- [7] Moleong, L. J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [8] Nikmah, A. L. (2015). PEMBERITAAN KASUS PENUTUPAN LOKALISASI PROSTITUSI DOLLY (Analisis Framing pada Surat Kabar Republika dan Kompas Edisi Juni 2014). Skripsi: UIN Walisongo, 22.
- [9] Pandia, A. S. (2011). Jatim Tutup Lokalisasi Tanpa Relokasi . Jawa Timur: Agnes Swetta Br. Pandia. 201 <https://nasional.kompas.com/read/2011/11>

-
- /20/16353320/jatim.tutup.lokalisasi.tanpa.relokasi. .
- [10] Pemerintah Indonesia . (1992). Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian pasal 44 . Jakarta.
- [11] Pratama, I. (2014). Dampak Penutupan Lokalisasi Bangunsari Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bangunsari Krembangan Surabaya. *Jurnal Skripsi Universitas Negeri Surabaya*, 2-3.
- [12] Rismala, R. (2016). Analisis Dampak Sosioal Ekonomi Dari Penutupan Lokalisasi Gude Terhadap Eks-PSK, Mucikari, Dan Masyarakat Terdampak yang Berdomisili di Kabupaten Madiun. *Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3.
- [13] Situmorang, A. T. (2011). Pengaruh Efisiensi Perekonomian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 32. *Universitas Diponegoro Semarang*, 42.